

KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG

Budi S. SATARI*

PENDAHULUAN

Sebagai satu-satunya bangsa non-Barat yang sudah sangat maju industrinya dan sebagai sekutu Amerika Serikat yang terkuat di Asia, Jepang adalah salah satu negara yang cukup penting dalam politik internasional. Tetapi, Jepang harus menghadapi suatu masalah universal dalam mencari jalan ke luar untuk dapat bertahan di abad nuklir ini. Para pemimpin Jepang menyadari bahwa meskipun persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di Timur Jauh telah memungkinkan Jepang untuk muncul kembali sebagai suatu kekuatan politik yang aktif, hal itu juga merupakan ancaman; di mana apabila terjadi peperangan, kemungkinan besar Jepang akan terlibat sebagai suatu medan pertempuran. Untuk mencegah terjadinya hal itu, para pemimpin Jepang berusaha untuk menjalin suatu persekutuan dengan Amerika Serikat sementara berusaha agar persekutuan itu tidak merupakan ancaman dan provokasi bagi Uni Soviet.¹ Maka, sejak Jepang memperoleh kedaulatannya pada tahun 1951, Jepang memiliki keamanan yang relatif tinggi dengan biaya yang sangat rendah.

Selama lebih dari 20 tahun, Kebijakan Pertahanan Jepang dibuat sejalan dengan Pasal 9 Konstitusi Jepang yang mengutuk "perang sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional". Tetapi ancaman Uni Soviet, yang dewasa ini mulai meningkatkan kegiatan dan kekuatan militernya di perairan dan kepulauan-kepulauan yang berbatasan dengan Jepang, memaksa Pemerintah Jepang untuk meninjau kembali Kebijakan Pertahanannya. Rencana Pemerin-

persenjataan Pasukan Bela Dirinya itu mendapat tentangan yang keras baik di dalam negeri maupun di negara-negara Asia Tenggara. Maka, tulisan ini akan mencoba untuk membahas berbagai faktor yang berhubungan dengan Kebijakan Pertahanan Jepang serta pengaruh pertahanan Jepang terhadap keamanan Asia Tenggara.

I. FAKTOR GEOPOLITIS

Letak geografis Jepang adalah salah satu faktor utama dalam menentukan Kebijakan Pertahanannya. Keempat pulau utamanya, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu, membentuk setengah lingkaran di lepas Pantai Asia Timur, terbentang 1.500 mil dari Propinsi Maritim Uni Soviet di utara menuju lembah Yantze di Cina di selatan. Menjorok ke arah Jepang dari daratan Benua Asia adalah Semenanjung Korea, sebuah sarana alam untuk perdagangan maupun penyerbuan. Di sebelah utara Hokkaido adalah Kepulauan Sakhalin dan Kurile (yang diperebutkan oleh Jepang dan Uni Soviet) dan di sebelah selatan, dekat dengan Taiwan dan Pilipina, adalah Kepulauan Ryukyu. Di sebelah Tenggara Honshu di Lautan Pasifik adalah Kepulauan Bonin, dan 4.500 mil di sebelah Timur menyeberangi Lautan Pasifik adalah Amerika Serikat. Faktor geografis ini telah menjadi pertimbangan utama dalam Kebijakan Pertahanan Jepang sejak pertengahan abad ke-19 hingga saat ini. Arti strategis Semenanjung Korea dan kepulauan-kepulauan itu telah menjadi perhatian Jepang yang utama. Di tangan kekuatan yang bersahabat mereka merupakan lingkaran pertahanan dalam bagi Jepang. Sedangkan di tangan kekuatan yang bermusuhan mereka merupakan ancaman pengepungan dan penyerbuan.¹

Sebelum Perang Dunia II, Jepang menguasai Korea dan semua kepulauan tersebut di atas. Uni Soviet, negara Bolshevisme yang dianggap sebagai ancaman utama oleh para pemimpin Jepang, tengah sibuk dengan masalah dalam negeri dan industri. Cina sedang berada di tengah perang saudara. Maka, pada saat itu Jepang tidak berada dalam bahaya penyerangan. Karena masalah kelebihan penduduk dan kekurangan sumber daya alam, Jepang merencanakan untuk menciptakan suatu wilayah militer dan ekonomi Asia Timur di bawah pimpinan

menjamin keamanan serta kemakmuran Jepang. Caranya ialah dengan menghancurkan sistem kolonial Barat di Asia Timur dan Asia Tenggara. Tetapi Amerika Serikat, yang menentang hegemoni Jepang di kawasan itu, merupakan hambatan yang utama. Keengganan Jepang untuk memenuhi persyaratan perdamaian Amerika Serikat, yaitu ditariknya pasukan-pasukan Jepang dari Cina dan Indocina, dan blokade ekonomi Amerika Serikat terhadap Jepang telah menggagalkan perundingan-perundingan diplomatik antara kedua negara itu. Puncak dari memburuknya hubungan Jepang dengan Amerika Serikat ialah serangan Jepang terhadap pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 yang menyebabkan pecahnya Perang Pasifik.

II. PEMBENTUKAN PASUKAN BELA DIRI

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II itu telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam sistem politiknya. Tentara Pendudukan Amerika Serikat telah diperintahkan untuk mengubah Jepang dari sebuah negara agresor di bawah kaum militeris otoriter menjadi negara yang damai tidak bersenjata di bawah suatu pemerintah yang demokratis dan bertanggung jawab. Angkatan darat dan laut Jepang dibubarkan dan para pemimpinnya diadili sebagai penjahat perang. Lebih lanjut lagi, industri pesawat terbang, kapal laut dan persenjataan ditiadakan, dan industri berat serta industri kimia dibatasi. Kemudian, konstitusi Jepang diubah untuk mencantumkan pengutukan perang sebagai kedaulatan bangsa dan larangan pembentukan angkatan bersenjata dan potensi perang lainnya.

Pecahnya Perang Korea di awal tahun 1950-an telah mengubah Kebijakan Tentara Pendudukan Amerika Serikat terhadap keamanan dalam negeri Jepang. Kepergian pasukan Amerika Serikat, yang ditempatkan di Jepang untuk keamanan dalam negeri, ke medan pertempuran di Korea menyebabkan Panglima Tertinggi Tentara Sekutu (Supreme Commander of the Allied Powers) memberi kuasa kepada Pemerintah Jepang untuk membentuk Cadangan Polisi Nasional yang terdiri dari 75.000 orang sebagai tambahan dari kekuatan polisi setempat, dan sebagai inti dari kekuatan militer di masa

Jepang yang menyatakan bahwa "angkatan darat, laut dan udara seperti halnya potensi perang lainnya tidak akan pernah didirikan". Akibatnya, baik penguasa Amerika Serikat maupun Jepang terpaksa menyembunyikan tujuan yang sebenarnya dari pembentukan Cadangan Polisi Nasional itu.

Pecahnya Perang Korea dan pengaruhnya terhadap keamanan dan pertahanan Jepang memperkuat kenyataan bahwa Semenanjung Korea tidak dapat dibiarkan jatuh ke tangan kekuatan yang bermusuhan. Maka, bersamaan dengan penandatanganan perjanjian perdamaian dengan 49 negara pada tahun 1951, Jepang juga menandatangani perjanjian keamanan bilateral dengan Amerika Serikat. Perjanjian keamanan itu mencakup hak Amerika Serikat untuk tetap menempatkan angkatan bersenjata di Jepang, dan untuk menggunakan pasukan-pasukan itu guna memelihara keamanan dan perdamaian internasional di Timur Jauh, dan untuk keamanan dan ketertiban dalam negeri apabila diminta oleh Pemerintah Jepang. Dengan kata-kata lain, penempatan kekuatan militer Amerika Serikat di Jepang adalah guna mencegah jatuhnya Korea Selatan ke tangan Uni Soviet, dan perjanjian keamanan itu melindungi Jepang di bawah payung nuklir Amerika Serikat. Kedua perjanjian itu dicela oleh kelompok-kelompok sayap kiri di Jepang, karena perjanjian perdamaian itu mengabaikan Uni Soviet dan RRC, dan karena perjanjian keamanan itu dianggap inkonstitusional dan mengikat Jepang kepada "imperialis" Amerika.¹ Perjanjian keamanan itu sebenarnya melanggar Pasal 9 Konstitusi Jepang karena mukadimahnya menyatakan bahwa Jepang diharapkan untuk "secara bertahap meningkatkan tanggung jawabnya atas pertahanannya terhadap serangan langsung maupun tidak langsung". Adalah dikatakan bahwa Jepang memperoleh kedaulatannya dalam perjanjian perdamaian tahun 1951 itu dengan syarat bahwa Jepang harus mempersenjatai kembali negaranya dan bergabung dalam sistem pertahanan Amerika Serikat.² Perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat itu mendapat tentangan yang keras dari berbagai lapisan masyarakat di Jepang karena penempatan tentara Amerika Serikat di Jepang secara otomatis melibatkan Jepang ke dalam Perang Dingin. Tetapi, para pemimpin konservatif Jepang menyetujui ikatan dengan Amerika Serikat karena kekuatiran mereka terhadap komunisme yang

1. *Ibid.*, hal. 77.

merupakan salah satu dasar dari kebijakan dalam dan luar negeri mereka sejak sebelum perang.

Pada bulan April 1952, Cadangan Polisi Nasional direorganisasi menjadi Agensi Keselamatan Nasional yang terdiri dari 100.000 orang Pasukan Keselamatan Nasional dan 8.900 orang Pasukan Keselamatan Maritim. Pada bulan Maret 1954, Pemerintah Jepang di bawah PM Yoshida menandatangani Persetujuan Bantuan Kerja Sama Pertahanan dengan Amerika Serikat. Tujuan utama persetujuan itu ialah untuk membuat dasar hukum yang tepat bagi Amerika Serikat dalam memberikan bantuan perlengkapan militer dan teknologi kepada Jepang sesuai dengan perjanjian keamanan bersama tahun 1951, dan untuk memperjelas peranan Jepang dalam membantu angkatan bersenjata Amerika Serikat yang berkedudukan di Jepang. Sebelumnya, pada tahun 1953, Amerika Serikat telah menyarankan kepada Jepang agar membentuk angkatan bersenjata yang berkekuatan 350.000 orang sebagai usaha pertahanannya sendiri. Saran tersebut ditolak oleh Pemerintah Jepang karena masalah keterbatasan konstitusional, kesulitan-kesulitan sosial dan politik, biaya, dan perkiraan bahwa mereka tidak dapat merekrut orang sebanyak itu.¹ Tetapi, setelah perdebatan yang panjang dan pahit di dalam Diet, pemerintahan Yoshida memperoleh persetujuan Diet untuk Undang-undang Pembentukan Agensi Pertahanan dan Undang-undang Pasukan Bela Diri pada bulan Juni 1954. Undang-undang ini mengizinkan dibentuknya Agensi Pertahanan Nasional dan Pasukan-pasukan Bela Diri Darat, Laut dan Udara dengan kekuatan total sebesar 152.110 orang. Lebih lanjut lagi, undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas dari pasukan-pasukan ini adalah "untuk mempertahankan Jepang dari serangan langsung maupun tak langsung, dan apabila diperlukan, untuk memelihara ketertiban masyarakat". Ini merupakan pengakuan pemerintah yang pertama tentang tanggung jawabnya terhadap pertahanan Jepang ke luar.²

Pembentukan Pasukan Bela Diri itu tentu saja menimbulkan tentangan dari berbagai lapisan masyarakat Jepang terutama dari partai-partai politik berhaluan kiri yang menyatakan bahwa PBD itu adalah inkonstitusional. Kaum sosialis, sementara mengakui adanya kemungkinan tentang hak membela diri, menyatakan bahwa Pasal 9

pergunakan kekuatan militer untuk membela diri. Penentang-penentang PBD, selama bertahun-tahun, dengan sia-sia berusaha mendapatkan ketentuan hukum dari pengadilan-pengadilan Jepang tentang dasar konstitusional PBD. Tetapi, keputusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 1959 menyatakan bahwa Pasal 9 Konstitusi Jepang tidak mengingkari hak Jepang untuk membela diri; dan penempatan pasukan atas dasar perjanjian keamanan adalah tidak inkonstitusional, karena pasukan asing bukanlah "potensi perang" seperti yang dimaksud dalam konstitusi Jepang.¹

III. KETERLIBATAN JEPANG DALAM PERANG DINGIN

Hubungan Jepang-Uni Soviet

Pada bulan Oktober 1956, pemerintahan Hatoyama Ichiro, yang menggantikan Yoshida sebagai Perdana Menteri, berhasil mencapai persetujuan dengan Uni Soviet untuk mengakhiri permusuhan dan menjalin hubungan diplomatik. Jepang mengharapkan bahwa Uni Soviet akan mengembalikan Pulau-pulau Shikotan, Kunashiri, Etorofu, dan Kepulauan Habomai di sebelah utara Hokkaido. Uni Soviet menolak untuk menandatangani perjanjian perdamaian atas dasar masalah teritorial, kecuali kalau Jepang membatalkan perjanjian keamanannya dengan Amerika Serikat.² Tetapi, akhirnya Jepang dan Uni Soviet menjalin hubungan diplomatik meskipun tanpa persetujuan masalah teritorial dan tanpa perjanjian perdamaian. Anggapan Uni Soviet bahwa perjanjian keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat adalah hambatan utama bagi perjanjian Jepang dengan Uni Soviet tentu saja dapat dimengerti. Pada tahun 1960, setelah Jepang dan Amerika Serikat memperbarui perjanjian pertahanan mereka, Uni Soviet menyatakan bahwa Pemerintah Uni Soviet tidak akan meresmikan perdamaian dengan Jepang selama pasukan asing masih ditempatkan di Jepang.³ Perjanjian yang diperbarui itu mewajibkan Amerika Serikat untuk melindungi wilayah Jepang dari serangan-serangan bersenjata dan mengizinkan kekuatan-kekuatan darat, laut dan udara Amerika Serikat untuk mempergunakan fasilitas dan wilayah di Jepang guna menjaga keamanan Jepang dan memelihara perdamaian inter-

nasional di Timur Jauh. Perjanjian tersebut jelas merupakan ancaman bagi Uni Soviet, karena Jepang dapat merupakan pangkalan bagi operasi-operasi militer Amerika Serikat.

Dewasa ini, Uni Soviet kelihatannya mulai meningkatkan kekuatan militernya di kepulauan-kepulauan dan perairan yang berbatasan dengan Jepang. Meskipun peningkatan kekuatan militer Uni Soviet itu adalah bertujuan untuk menggertak Jepang saja, Pemerintah Jepang menanggapi hal itu dengan serius. Apalagi, terjadinya insiden Mig-25 pada bulan September 1977 (di mana seorang penerbang angkatan udara Uni Soviet berhasil mendaratkan sebuah pesawat Mig-25 di sebuah pelabuhan udara sipil Jepang tanpa diketahui oleh sistem pertahanan udara PBD) menunjukkan bahwa pertahanan udara Jepang sangat lemah. Maka, walaupun Pemerintah Jepang percaya bahwa pada saat ini Uni Soviet tidak akan melakukan penyerbuan terhadap Jepang, adalah dirasakan perlu untuk meningkatkan pertahanan wilayah pertahanan udara Jepang guna menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jalan lain untuk menghadapi ancaman Uni Soviet itu ialah dengan mengadakan persekutuan dengan RRC atau dengan mengandalkan kekuatan diplomasinya.¹ Persekutuan dengan RRC di bidang pertahanan jelas akan merupakan provokasi bagi Uni Soviet dan, seperti halnya dalam persekutuannya dengan Amerika Serikat, Jepang berusaha sedapat mungkin untuk menghindarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menyebabkan konfrontasi dengan Uni Soviet. Maka, sedapat mungkin Jepang akan mempergunakan kekuatan diplomasinya sebagai cara untuk menjamin keamanannya, tanpa harus bergantung dari payung nuklir negara-negara *super power* lainnya dan tanpa harus membangun kekuatan militernya sendiri.

Hubungan Jepang-RRC

Selama bertahun-tahun, Kebijakan Jepang terhadap masalah Cina "diatur" oleh Amerika Serikat. Sebelum tahun 1971, Jepang mempunyai hubungan dagang dengan RRC sementara menjalin hubungan diplomatik yang cukup stabil dengan Taiwan untuk memperoleh

selalu berjalan dengan lancar, sebab Beijing tiba-tiba menghentikan perdagangan pada tahun 1958, dan Taipei hampir memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 1963.¹

Pada tahun 1960, Zhou Enlai mengumumkan 3 prinsip politik yang mempengaruhi hubungan dagang dengan Jepang yang terus diulang setiap tahun, yaitu:

1. Pemerintah Jepang tidak boleh bermusuhan terhadap Cina, karena Pemerintah Cina tidak memusuhi Jepang.
2. Jepang tidak boleh mendukung "komplotan dua Cina".
3. Pemerintah Jepang tidak boleh menghambat normalisasi hubungan Cina-Jepang.

Di lain pihak, Pemerintah Jepang secara konsisten telah mendukung prinsip "pemisahan politik dan ekonomi", sehingga semua perundingan dengan Beijing dilakukan secara pribadi tanpa partisipasi anggota eksekutif kementerian-kementerian pemerintah. Biasanya delegasi itu terdiri dari anggota Parlemen LDP dari fraksi pro-Beijing.

Pemerintah Komunis Cina menolak argumentasi Jepang dan berulang-ulang menyatakan bahwa politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, dan mempergunakan perundingan-perundingan tersebut sebagai forum untuk mempropagandakan kesalahan dalam kebijakan Pemerintah Jepang. Sejauh itu, para peserta dari Jepang berusaha untuk menerima segala caci maki itu sekedar untuk menjaga terpeliharanya saluran komunikasi dengan RRC yang hanya satu-satunya itu. Pada, tahun 1969, Beijing menegaskan bahwa Pemerintah RRC adalah satu-satunya Pemerintah Cina yang sah, dan bahwa perjanjian perdamaian antara Jepang dan Taiwan adalah tidak sah, dan perjanjian keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat adalah persekutuan militer yang agresif. Tentu saja hal ini menimbulkan kehebohan di kalangan Pemerintah Jepang dan LDP, sebab delegasi Jepang "menyetujui" atau "menghargai" pernyataan-pernyataan itu.²

Dipengaruhi oleh cara berpikir Amerika, RRC merupakan ancaman keamanan bagi Jepang terutama setelah RRC mempunyai

kekuatan nuklir strategis. Jepang selalu berusaha untuk menghindari konfrontasi dengan RRC, karena akibatnya akan terasa di seluruh Asia dan Jepang harus mempersenjatai dirinya. Sehubungan dengan perkembangan keadaan, di mana Amerika Serikat mulai mengadakan pendekatan terhadap RRC dan juga dengan diterimanya RRC di PBB, maka Jepang segera memulihkan hubungannya dengan RRC. Tentu saja perubahan kebijakan semacam itu menimbulkan berbagai kesulitan besar, sehubungan dengan perencanaan ekonomi, politik dan militer Jepang yang, antara tahun 1965-1971 khususnya, dipusatkan pada solidaritas dengan Taiwan dan Korea Selatan.¹ Tetapi setelah Amerika Serikat mengubah kebijakannya terhadap RRC tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jepang, maka kelihatannya Jepang tidak dapat terus-menerus bergantung pada Amerika Serikat. Maka pada bulan September 1972, Jepang dan RRC meresmikan pemulihan hubungan antara kedua negara.

Hubungan kedua negara tersebut dalam 8 tahun terakhir ini kelihatan semakin dekat karena masing-masing menyadari bahwa mereka membutuhkan satu sama lain, terutama dalam menghadapi ancaman Uni Soviet. RRC membutuhkan teknologi dan kekuatan ekonomi Jepang dalam proses modernisasinya, sedangkan Jepang membutuhkan RRC sebagai salah satu sumber bahan mentah yang diperlukan oleh industrinya dan juga untuk pemasaran barang-barang produksinya. Di samping itu, seperti telah dikemukakan di atas, RRC adalah satu alternatif bagi Jepang dalam menghadapi ancaman Uni Soviet. Lagi pula, secara historis Jepang dan Cina mempunyai ikatan kebudayaan yang erat, sehingga, meskipun pada saat ini kedua negara itu mempunyai "ideologi" yang bertentangan, sedikit banyaknya mereka lebih mudah untuk mengerti satu sama lain. Malah ada pendapat bahwa kerja sama yang kuat antara Jepang dan RRC, di mana kekuatan ekonomi yang besar membantu dan dibantu oleh wilayah yang luas dan tenaga manusia yang berjumlah besar, akan memungkinkan kedua negara itu untuk muncul sebagai *superpower* di dunia, menggantikan kedudukan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kredibilitas, pengaruh, dan kekuatan ekonominya relatif mulai menurun.

IV. FAKTOR POLITIK DAN EKONOMI

Politik dan Strategi

Antara tahun 1960 dan 1970, ekonomi Jepang dan Pasukan Bela Diri berkembang dengan pesat. Meluasnya Perang Indocina pada pertengahan tahun 1960-an menyebabkan Jepang menjadi pasar utama di luar negeri untuk melengkapi kebutuhan persenjataan Amerika Serikat. Demikian juga pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Jepang dan Okinawa sangatlah vital dalam perang tersebut. Seperti halnya dalam Perang Korea, perusahaan-perusahaan Jepang memperoleh keuntungan yang cukup besar dari Perang Indocina itu, meskipun Jepang tidak terlibat secara aktif dalam pertempuran.

Tetapi di dalam negeri terjadi beberapa insiden politik mengenai masalah pengembalian Okinawa, tentangan terhadap penggunaan pangkalan Amerika Serikat di Jepang dalam Perang Indocina, kunjungan kapal induk berkekuatan nuklir "Enterprise" pada tahun 1968, penangkapan kapal "Pueblo" dan penembakan pesawat mata-mata EC-121 oleh Korea Utara. Timbullah perdebatan tentang apa yang akan terjadi pada Jepang apabila ia terlibat dalam suatu perang nuklir. Maka, faham perdamaian Pasal 9 Konstitusi Jepang selalu menjadi topik utama dalam perdebatan di Parlemen Jepang.

Komunike Sato-Nixon dan pidato PM Sato "Abad Pasifik Baru" pada awal tahun 1972 mengungkapkan pengakuan Pemerintah Jepang tentang pentingnya pangkalan Amerika Serikat di Okinawa dalam memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Sato juga menjelaskan bahwa Jepang menganggap bahwa tanggung jawabnya di bawah perjanjian keamanan telah menjadi lebih luas daripada anggapan semula. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Jepang secara resmi menyatakan bahwa Taiwan dan Korea Selatan adalah penting bagi keamanan Jepang dan secara terbuka PM Jepang itu menyatakan dimulainya suatu orde baru di kawasan Pasifik atas dasar persekutuan Jepang dan Amerika Serikat. Tentu saja pernyataan itu menimbulkan kritik di dalam negeri dan reaksi yang keras dari RRC.¹

Komunike Sato-Nixon menyatakan bahwa Jepang secara bertahap

maupun dari segi peranan pertahanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

V. TENTANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG

Dalam Negeri

Prinsip pengawasan sipil terhadap angkatan bersenjata adalah dasar dari kebijakan pertahanan Jepang purna-perang. Di bawah undang-undang itu, Perdana Menteri harus memperoleh persetujuan Diet sebelum memerintahkan PBD untuk beraksi dalam keadaan yang bagaimanapun. Para panglima tentara Jepang telah lama merasa cemas menghadapi tanggung jawab yang kurang sungguh-sungguh dalam masalah pertahanan ini. Awal bulan Agustus 1978, Jenderal Hiroomi Kurisu, Ketua Dewan Staf Gabungan, telah diberhentikan dari jabatannya setelah ia menyatakan bahwa PBD akan melakukan "tindakan supra-legal" apabila terjadi serangan mendadak terhadap Jepang. Ia juga mengatakan bahwa Jepang harus memiliki kemampuan untuk serangan ofensif dalam mempertahankan wilayahnya. Pemberhentian Jenderal Kurisu secara tiba-tiba itu kelihatannya merupakan usaha pemerintah untuk mencegah timbulnya perdebatan akibat pernyataan yang dikeluarkannya. Masalah pertahanan adalah sumber kritik politik masyarakat yang sangat sensitif sejak bertahun-tahun. Tetapi segera setelah pemberhentian Jenderal Kurisu, PM Fukuda mengumumkan bahwa agensi Pertahanan telah diperintahkan untuk mempercepat pengkajian suatu rencana Undang-undang Darurat yang mungkin dapat memperbaiki pertahanan sipil.¹ Kelihatannya para politikus sipil Jepang juga menanggapi permasalahan yang dinyatakan oleh Jenderal Kurisu itu dengan serius, apalagi ketika itu Amerika Serikat merencanakan untuk mengurangi secara bertahap pasukan-pasukannya yang ditempatkan di Jepang.

Sejak intervensi Uni Soviet di Afghanistan pada akhir tahun yang lalu, Amerika Serikat dan, secara tidak langsung, RRC telah meningkatkan tekanan terhadap Jepang untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam pertahanan, terutama dalam mengamankan

jalur perairan vital di Pasifik dan Asia Tenggara. Partisipasi PBD Maritim Jepang dalam latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Selandia Baru pada bulan Maret 1980 menunjukkan bahwa Jepang telah mulai memainkan peranan yang lebih besar dalam pertahanan Timur Jauh. Partisipasi PBD maritim dalam latihan militer bersama itu telah menimbulkan perdebatan umum baik di kalangan Diet maupun di kalangan masyarakat, karena Jepang tidak mempunyai perjanjian keamanan bilateral dengan ketiga negara lain yang turut dalam latihan tersebut kecuali dengan Amerika Serikat. Tetapi banyak pula pejabat-pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh politik yang mendukung peranan PBDM dalam latihan itu, karena mereka menyadari bahwa keadaan telah berubah sehingga mereka harus menyesuaikan diri dalam membuat kebijakan ekonomi dan pertahanan. Dikatakan juga bahwa sudah saatnya bagi Jepang untuk melihat tidak saja secara bilateral, tetapi juga secara regional dan global dalam masalah pertahanan.¹

Menjelang pemilihan umum yang diselenggarakan pada akhir bulan Juni tahun ini, masalah pertahanan kembali menjadi topik dalam kampanye para politikus sipil. Dua alasan utama yang menyebabkan masalah itu menjadi topik perdebatan ialah timbulnya kesadaran bahwa Uni Soviet mulai meningkatkan kekuatannya secara global, bahkan di Kepulauan Kurile yang dekat sekali dengan pantai utara Jepang, dan alasan yang mungkin terpenting ialah bagaimana masa depan Jepang, yang mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya, apabila timbul peperangan di Timur Tengah.

Masalah yang diperdebatkan umumnya berkisar pada pertanyaan apakah Jepang harus meningkatkan anggaran belanja militernya, yang pada saat ini adalah keenam terbesar di dunia (US\$ 9.2 juta setahun), dan apakah Jepang harus meningkatkan atau mengurangi kerja sama dengan Washington sesuai dengan perjanjian keamanan bilateral mereka. Umumnya partai-partai yang berhaluan kiri menghendaki dibatalkannya perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat dan dibubarkannya PBD. Partai-partai berhaluan tengah, seperti DSP dan Komeito, yang mungkin akan berkoalisi dengan LDP seandainya LDP tidak dapat memperoleh mayoritas, sedikit banyaknya mendukung perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat meskipun mereka

menghendaki pengawasan yang ketat dari kaum sipil terhadap golongan militer. Berdasarkan survei dari suatu lembaga swasta, *Japan Public Opinion Association*, hampir 30% dari orang-orang yang ditanya ternyata mendukung program pertahanan yang lebih kuat. Hasil survei ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang hampir dua kali lipat dari hasil survei yang sama yang dilakukan kurang dari 6 bulan sebelumnya.¹ Maka jelaslah bahwa perkembangan keadaan politik internasional dewasa ini telah mulai membangkitkan kesadaran pertahanan nasional rakyat Jepang, meskipun pada umumnya masyarakat tidak mau tahu tentang masalah itu.

Reaksi Negara-negara Asia Tenggara

Sejauh ini pemerintah negara-negara Asia Tenggara belum memperlihatkan suatu sikap resmi mengenai masalah pertahanan Jepang. Tetapi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi yang lebih tua, kelihatannya ada suatu kekuatiran bahwa apabila Jepang meningkatkan kekuatannya ia akan menjadi negara agresor di bawah kaum militeris seperti pada waktu Perang Dunia II. Ini terlihat dari banyaknya surat pembaca di majalah-majalah terkemuka, seperti *Asiaweek* dan *Far Eastern Economic Review*, dari beberapa negara Asia Tenggara yang isinya menentang peningkatan kekuatan pertahanan Jepang.

Masalah ini memang harus dikaji dengan sungguh-sungguh. Kepadatan penduduk, kekurangan sumber daya alam, dan keinginan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah masalah berat yang dihadapi Jepang sejak sebelum perang. Tetapi di dalam situasi dan kondisi dewasa ini kemungkinan bahwa Jepang akan mempergunakan kekuatan militer untuk mengatasi masalah-masalah itu adalah kecil, bahkan dapat dikatakan tidak akan pernah terjadi. Alasannya antara lain ialah bahwa Konstitusi Jepang menyatakan bahwa "perang sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa internasional" dikutuk selama-lamanya sebagai kedaulatan bangsa. Lagi pula, peningkatan kekuatan militer yang besar-besaran akan mendapat tentangan yang keras dari masyarakat Jepang sendiri, sehingga peningkatan kekuatan militer Jepang hanya akan terbatas

pada pertahanan wilayah semata-mata. Lebih jauh lagi, Jepang tidak mempunyai dana yang cukup besar untuk membiayai suatu peperangan, karena Jepang lebih menitikberatkan kesejahteraan rakyatnya sebagai salah satu kepentingan nasionalnya yang utama. Alasan lainnya ialah Jepang percaya bahwa dengan diplomasi Jepang akan lebih berhasil untuk mengatasi masalah-masalah ekonominya, meskipun dominasi ekonomi Jepang di dunia, khususnya di Asia Tenggara, sempat mengundang suatu perasaan anti-Jepang yang mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1970-an dalam bentuk huru-hara anti-Jepang di Indonesia dan Muangthai.

Maka dapat dikatakan bahwa peningkatan pertahanan Jepang bukanlah merupakan suatu ancaman bagi keamanan Asia Tenggara. Malah mungkin akan membantu keamanan Asia Tenggara, karena hal itu akan dapat mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet dan RRC di Timur Jauh. Jadi sejauh ini tidak ada alasan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk merasa cemas terhadap peningkatan sistem pertahanan Jepang, kecuali apabila terjadi perkembangan-perkembangan baru di masa mendatang.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji latar belakang sejarah, faktor-faktor geopolitis, ekonomi, dan politik yang berhubungan dengan kebijakan pertahanan Jepang maka dapat dikatakan bahwa masalah pertahanan adalah masalah yang sangat sensitif dalam politik Jepang. Tetapi cepat atau lambat Jepang harus mengurangi bahkan meninggalkan ketergantungannya pada perlindungan Amerika Serikat. Usaha pemerintah untuk menanamkan kesadaran pertahanan nasional di kalangan rakyat mungkin akan memakan waktu yang lama, terutama karena adanya tentangan-tentangan dari partai oposisi. Bagaimanapun juga, peningkatan kekuatan militer Uni Soviet di Timur Jauh adalah suatu ancaman yang harus ditanggapi dengan serius oleh Jepang. Kepercayaan bahwa Jepang dapat bertahan di abad nuklir ini dengan damai tanpa bersenjata dan keyakinan bahwa Jepang dapat mengandalkan kekuatan diplomasi saja sebagai cara untuk mengatasi masalah-masalah internasional adalah suatu angan-angan yang utopis.

besarnya anggaran belanja militer, kemungkinan bangkitnya kembali militerisme, masalah kontrol golongan sipil terhadap golongan militer, dan keterbatasan konstitusional. Banyak tokoh-tokoh politik Jepang yang merasa bahwa PBD sudah memiliki kemampuan militer yang cukup kuat, sebab anggaran pertahanan Jepang meskipun diukur sebagai bagian yang terkecil dari GNP-nya telah cukup untuk membiayai angkatan bersenjata yang mempunyai kemampuan ofensif untuk beroperasi di luar wilayah Jepang. Tetapi selama rakyat Jepang tidak mendukung program pertahanan itu, kekuatan militer yang kuat itu tidak akan dapat berbuat banyak, selain sebagai alat untuk mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet di kawasan itu.

Dalam hubungannya dengan Asia Tenggara, maka kelihatannya peningkatan kekuatan pertahanan Jepang, meskipun akan besar pengaruhnya dalam perkembangan keadaan politik, ekonomi dan strategi, tidak akan merupakan ancaman bagi Asia Tenggara. Malah hal itu mungkin akan merupakan suatu keuntungan, karena akan merupakan imbangan bagi kekuatan militer Uni Soviet dan RRC di Timur Jauh. Selama Perang Dingin tidak meluas ke kawasan Asia Tenggara, dan selama negara-negara *superpower* mau menghormati gagasan ZOPFAN ASEAN dengan tidak menempatan kekuatan militernya di kawasan ini, maka keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara dapat terpelihara. Perkembangan selanjutnya tentu saja akan bergantung pada perubahan keadaan politik internasional yang masih harus diikuti dengan seksama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Emmerson, John K., *Arms Yen and Power*, Tokyo: Charles Tuttle Company, 1973
- Halliday, Jon, and McCormack, Gavan, *Japanese Imperialism Today*, Great Britain: Penguin Books, 1974
- Lewis, John, "War-game Waves Sweep Tokyo", *Far Eastern Economic Review*, Vol. 107, No. 13, March 28, 1980
- Livingston, John, et. al., ed., *The Japan Reader*, Great Britain: Penguin Books, 1976
- Soesastro, Hadi, *Jepang Dalam Dunia yang Berubah*, CSIS, tidak diterbitkan, 1980
- Weinstein, Martin, *Japan's Postwar Defense Policy*, New York: Columbia University Press, 1971
- White, Nancy J., and Field, Alan M., "Japan: Surprise Attack", *Newsweek*, Vol. XCII, No. 6, August 7, 1978.

DAFTAR ISI ANALISA TAHUN IX, 1980:

1. BERBAGAI MASALAH EKONOMI INTERNASIONAL (Rp. 500,00):
 - J. PANGLAYKIM, *Beberapa Pandangan Mengenai Perkembangan Nilai Dollar Amerika*
 - N. ARSJAD, *Benarkah Sistem Nilai Tukar Mengambang Sedang Diuji?*
 - R.B. SUHARTONO, *Hubungan-hubungan Ekonomi Indonesia — Amerika Serikat*
 - J. PANGLAYKIM, *Multinational Corporation: Bisnis Internasional dan ASEAN*
 - Audrey PARRY, *Kerawanan Suplai Minyak Negara-negara Barat*

2. PEDESAAN FOKUS PEMBANGUNAN (Rp. 500,00):
 - A. Rahman RANGKUTI, *Memperbaiki Kelestarian Alam dan Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan Jawa dengan Lamtoroisasi dan Arenisasi*
 - S. Sunarto NDARU MURSITO, *Sumber Daya Manusia di Pedesaan Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi*
 - Jacob OETAMA, *Pers dan Pembangunan Desa*
 - Raymond ATJE, *Konsumsi Energi di Sektor Rumah Tangga Desa*
 - Jon SIGURDSON, *Perencanaan Ekonomi Pedesaan RRC*

3. KAWASAN TELUK ARAB-PARSI DALAM PEREBUTAN (Rp. 500,00):
 - Michael B. SOEBAGYO, *Intervensi Soviet di Afghanistan dan Implikasi Internasionalnya*
 - B. WIROGUNO, *Harga Intervensi Militer Uni Soviet di Afghanistan*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Kawasan Teluk Parsi dalam Perebutan*
 - Thomas STAUFFER, *Arti Geopolitik Minyak Teluk Parsi*
 - John C. CAMPBELL, *Negara-negara Superpower di Kawasan Teluk Parsi*

4. MENGAMANKAN SUPLAI ENERGI (Rp. 500,00):
 - John P. HENRY, *Energi Dunia adalah Suatu Dilema yang dapat Diatasi*
 - Edgar O'BALLANCE, *Perebutan Minyak Timur Tengah*
 - Hadi SOESASTRO, *Dimensi-dimensi Baru Pengelolaan Energi di Kawasan Asia-Pasifik*
 - Michael B. SOEBAGYO, *Prospek Pemasaran Internasional Gas Alam Indonesia*
 - Ronald NANGOI, *Energi Alternatif Utama Australia: Batubara dan Uranium*

5. KAWASAN SAMUDERA HINDIA FOKUS KETEGANGAN (Rp. 500,00):
 - B. WIROGUNO, *Samudera Hindia Fokus Konfrontasi Superpower*
 - Dov ZAKHEIM, *Suatu Pendekatan Barat Terhadap Samudera Hindia*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Gerak-gerak Uni Soviet di Jazirah Arab dan Tanduk Afrika*
 - Otto ABDULRACHMAN, *Revolusi Iran di Tengah Pergolakan Timur Tengah*
 - Ronald NANGOI, *Arti Samudera Hindia Bagi Australia*
 - Michael B. SOEBAGYO, *Kemenangan Indira Gandhi dan Implikasinya Terhadap Kawasan yang Bergolak*

6. BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI (Rp. 500,00):
 - Hadi SOESASTRO, *Kebutuhan Energi bagi Rumah Tangga Desa di Indonesia*
 - Rio TAMBUNAN, *Arti dan Konsekuensi Membangun Masyarakat Modern dan Bagaimana Cara-caranya Mengatasi Akibat-akibat serta Pengaruh-pengaruh yang Negatif*